

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal adalah banyak sekolah yang belum memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sementara tantangan eksternalnya adalah globalisasi yang telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat (Puspitasari, 2018). Oleh karenanya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu penentu mutu sumber daya manusia karena dewasa ini keunggulan suatu bangsa bukan lagi diidentikkan dengan melimpahnya ruahnya kekayaan alam yang ada, akan tetapi lebih kepada keunggulan sumber daya manusianya, karena mutu sumber daya manusia berkontribusi positif bagi mutu pendidikan (Fitrah, 2017).

Sesuai dengan tantangan di atas, maka upaya peningkatan mutu pendidikan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyasa (2013) bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

Oleh karena itu, proses pendidikan yang bermutu dapat dilakukan jika anggota lembaga pendidikan bekerja secara optimal, mempunyai komitmen dan istiqamah dalam pekerjaannya. Tanpa adanya komitmen dan istiqamah dari para (pekerja), dalam konteks lembaga pendidikan, civitas akademika, maka lembaga

pendidikan tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan proses yang bermutu (Faturrohman, 2015).

Urgensi peningkatan mutu pendidikan dengan melihat pada kondisi realitas yang berkembang, tidak dapat ditunda lagi. Ilmu pengetahuan semakin berkembang mengharuskan pendidikan Nasional perlu melakukan internasionalisasi mutu agar sejajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di belahan dunia. Oleh karenanya, diperlukan sistem manajemen mutu, sehingga mampu meraih prestasi terbaik (Makbulloh, 2011). Akan tetapi, realitanya kondisi saat ini kontradiktif dengan apa yang diharapkan. Mutu pendidikan Nasional dinilai masih tergolong rendah. Salah satu masalah pokok yang dihadapi terkait mutu pendidikan saat ini adalah rendahnya kemampuan kepemimpinan kepala sekolah (Pahrudin, 2015).

Kepala sekolah sebagai faktor penting dan mendukung kemajuan suatu lembaga pendidikan diharapkan dapat menentukan arah kebijakan di lembaga pendidikan. Sebagai manager dari sebuah organisasi kepala sekolah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan organisasi. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang cukup memadai dari kepala sekolah dalam mengelola sekolah dan menata sumber daya manusia pendidikan.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, maka kepala sekolah sebaiknya memahami, menguasai dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai manajer pendidikan. Mutu pendidikan sangat tergantung dengan pengelolaan pendidikan yang memiliki perencanaan yang baik, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang jelas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2010)

menyatakan bahwa sekolah bermutu dipengaruhi oleh proses pendidikan yang bermutu dengan faktor pendukung, sarana dan prasarana dan biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat, serta lingkungan yang mendukung. Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah mempunyai tanggung jawab besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Mulyasa (2011) mengemukakan bahwa kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrah (2017) yang menyatakan bahwa sekolah itu berkualitas atau tidak sangat bergantung pada pola kepemimpinan kepala sekolah, karena dialah pimpinan tertinggi di sekolah dan dialah yang bisa mengambil keputusan dalam segala hal.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Seorang pemimpin mempunyai sifat yang unggul yang mampu membawa orang lain pada suatu kondisi tertentu. Seorang kepala sekolah harus mampu mempengaruhi orang lain menuju suatu perubahan sesuai dengan tuntutan situasi yang ada. Kepemimpinan adalah suatu untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Harso (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap keefektifan sekolah.

Kemudian Hasibuan (2011) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahannya, agar mau bekerja

sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu seni atau kemampuan dalam mempengaruhi dan menggerakkan staf yang dalam hal ini pegawai agar bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab . Pemimpin yang bertanggungjawab di dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman sehingga orang-orang dapat bekerja dengan penuh semangat.

Menurut Tilaar (2012) di dalam suatu organisasi, kepemimpinan (*leadership*) merupakan unsur yang penting di dalam keberhasilan organisasi. Di era desentralisasi ini, diperlukan pemimpin-pemimpin pendidikan dalam jumlah besar dan profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan pendapat Mukhtar dan Iskandar (2009) bahwa kepala sekolah selaku pemimpin secara langsung merupakan contoh nyata dalam aktivitas kerja bawahannya. Penampilan, sikap, dan tutur sapa kepala sekolah akan dipotret oleh bawahannya, dan selanjutnya akan ditiru bawahannya. Kepala sekolah yang rajin, cermat, jujur, bertanggungjawab , dan peduli terhadap bawahannya berdampak pada sikap dan perilaku bawahan dan sikap maupun perilaku pegawai akan berpengaruh kuat terhadap *out put* pendidikan.

Untuk mewujudkan kinerja sekolah yang sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai bagian dari sistem sekolah menduduki posisi strategis dalam mengarahkan dan mendukung aktivitas guru dalam pembelajaran siswa. Kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Peran kepemimpinan kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya kualitas kinerja guru yang profesional di sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai seorang

pemimpin yang memiliki visi ke masa depan yang jelas dan dapat mewujudkan serta mampu mendorong proses transformasi di sekolah. Dengan demikian gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh dan memiliki peran penting terhadap perubahan sekolah kearah yang lebih baik.

Kemudian faktor lain adalah peran komite sekolah sebagai peran control dari masyarakat. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu prinsip dalam menterjemahkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), dengan kata lain peran serta masyarakat mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan pendidikan dan evaluasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sejalan dengan pendapat Sagala (2013) yang mengemukakan bahwa masyarakat akan menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, sehingga hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Hariwibowo (2015) mengemukakan bahwa upaya peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan mutu sekolah dikukuhkan dengan mencantumkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dalam bagian ketiga pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.

Germawandi (2012) yang mengemukakan bahwa komite sekolah/madrasah sebagai lembaga yang mandiri berperan meningkatkan mutu pelayanan baik dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian pendapat Ansar (2008) yang mengemukakan bahwa Komite Sekolah merupakan badan

yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Akan tetapi, komite sekolah tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep mutu pendidikan (MBS).

Dari beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai manifestasi dari peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat memberikan pengaruh terhadap tata kelola lembaga pendidikan. Peran komite sekolah dapat berimplikasi lebih terjaminnya keberadaan dan kelangsungan lembaga sekolah, dengan adanya komite sekolah masyarakat lebih dapat menilai dan mengontrol terhadap program yang dilakukan sekolah. Kemudian masyarakat juga akan lebih peduli dan akan lebih mendukung program sekolah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung sumber dana dan pembangunan fisik sekolah.

Cucu (2014), peran komite sekolah/madrasah sangat diharapkan guna peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, apalagi dalam implementasi Mutu pendidikan (MBS). Peningkatan kinerja komite sekolah dapat diupayakan dengan mengoptimalkan peran dari setiap anggota komite sekolah, keterlibatan semua unsur dalam organisasi komite sekolah serta pembagian tugas yang sesuai dengan kapasitas personil akan mampu meningkatkan kinerja komite sekolah.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2009) dengan hasil penelitian yaitu peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan

masukan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Peran sebagai pengontrol dengan melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah. Komite sekolah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan yang berasal dari pusat agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diikutilangsung oleh warga masyarakat melalui lembaga seperti komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua hal tersebut tentunya dapat mendukung terciptanya mutu layanan pembelajaran yang lebih optimal dan berdampak pada meningkatnya pencapaian hasil belajar siswa sebagai *output* pendidikan di sekolah. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa organisasi pendidikan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan pendidikan jika di dukung oleh masyarakat. Dukungan masyarakat melalui komite sekolah memberi pengaruh yang besar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, karena komite sekolah dapat memberikan masukan, dan control terhadap penyelenggaraan pendidikan di lembaga sekolah.

Penelitian ini di laksanakan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim.. Hasil Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Juni hingga 10 Juni 2022 diperoleh informasi awal bahwa SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim, peneliti menemukan beberapa indikator yang menyatakan keterlibatan langsung

komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku. Hal ini terlihat dimana komite sekolah memberikan perhatian dan membangun komitmen dengan masyarakat untuk mendukung program-program sekolah yang bertujuan meningkatkan mutu SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku. Selain itu komite sekolah juga berperan menjadi penghubung kerjasama kemitraan antara perusahaan dan instansi pemerintah dengan SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku melalui kegiatan praktek kerja lapangan dan juga membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dikukuhkan melalui *memorandum of understanding* (MOU). Kemudian komite sekolah di SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku juga berperan dalam menampung ide-ide dan aspirasi masyarakat terutama menyangkut peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku

Ada beberapa permasalahan yang ditemui oleh peneliti, terkait dengan peran komite sekolah di SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku, seperti hanya sebagian pengurus komite sekolah aktif ikut melakukan monitoring kegiatan PBM di sekolah, begitu juga dalam rapat paripurna komite sekolah yang diadakan di sekolah, hal ini mengindikasikan kurangnya dukungan dari sebagian komite sekolah terhadap mutu pendidikan yang jelas menjadi kendala bagi peningkatan mutu sekolah khususnya kebutuhan sekolah terhadap sumber dana lain selain dana BOS.

Hasil temuan lain bahwa sebagian pengurus komite sekolah ada yang mengharapkan mendapat keuntungan atau di berikan upah (gaji) dalam menjalankan perannya sebagai komite sekolah. Hal ini menandakan bahwa sebagian komite sekolah belum memahami perannya sebagai komite sekolah

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah. Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Supriyanto (2013) komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama komite sekolah merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, atau nama lain yang disepakati. Dengan demikian, organisasi BP3 atau bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah melebur menjadi organisasi baru, yang bernama komite sekolah yang tercantum dalam Permendikbud No 75/2016 Tentang Komite Sekolah

Dengan demikian, komite sekolah merupakan lembaga perwakilan orang tua/wali murid yang dibentuk menggantikan BP3. Ada empat peran utama komite sekolah 1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*); 2) memberikan dukungan (*supporting agency*); 3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*); dan 4) penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa (*mediator*). Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan serta menggalang atau

menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tersebut di atas, belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan fasilitas sekolah di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim memiliki pengaruh terhadap kinerja guru. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Bertitik tolak pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepala Sekolah SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim belum menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik melalui program-program yang mendukung peningkatan mutu sekolah tersebut seperti program pelatihan guru dan program kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan perwujudan visi sekolah
2. Komite Sekolah di SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku belum berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya yang tercantum dalam Permendikbud No 75/2016 Tentang Komite Sekolah. Hal ini terlihat dari sebagian pengurus komite sekolah belum aktif ikut melakukan monitoring kegiatan PBM di sekolah, begitu juga dalam rapat paripurna komite yang diadakan di sekolah. Kemudian, sebagian pengurus komite sekolah masih

ada yang mengharapkan mendapat keuntungan atau di berikan upah (gaji) dalam menjalankan perannya sebagai komite sekolah, masalah lain yang ditemukakan adalah sering terjadi ketidaksamaan persepsi antara kepala sekolah dan sebagian komite sekolah dalam hal pelaksanaan kegiatan sekolah.

3. Mutu pendidikan di SD Negeri di Kecamatan Empat Petuai Dangku belum memenuhi standar minimal khususnya pada standdar mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraikan di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahannya yaitu:

1. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim?
2. Adakah pengaruh kepemimpinan komite sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim?
3. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama-sama terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh:

1. Kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim.

2. Komite sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim .
3. kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama-sama terhadap mutu pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Empat Petuai Dangku Kabupaten Muara Enim.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu Manajemen Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan.

b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi kepala sekolah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan memaksimalkan peran kepemimpinan dan komite sekolah.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi mengenai kepemimpinan kepala sekolah, komite sekolah dan mutu pendidikan.

d. Bagi Dinas Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan khususnya bagi peningkatan pengelolaan pendidikan.